2025

# RENCANA KERJA PERUBAHAN

## BADAN PENDAPATAN DAERAH
## KABUPATEN NUNUKAN

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan hasil penyesuaian terhadap dinamika pembangunan daerah, kebijakan nasional, serta kondisi aktual pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan.

Renja Perubahan Tahun 2025 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021–2026, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sebelumnya, capaian kinerja, serta arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPDP) Kabupaten Nunukan Tahun 2025.

Melalui dokumen ini, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan berupaya untuk memperkuat peran dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah, penguatan sistem administrasi perpajakan, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan wajib pajak.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renja Perubahan ini tidak terlepas dari berbagai masukan, dukungan, dan kerja sama dari seluruh pihak, baik dari perangkat daerah terkait, para pemangku kepentingan, maupun masyarakat. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan.

Semoga Renja Perubahan Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta menjadi dasar dalam upaya peningkatan pendapatan daerah yang berkelanjutan dan akuntabel demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan.

Nunukan, Juli 2025

Kepala Badan

Fitraeni, S.Sos

19731130200112200 2

Dipindai dengan CamScanner

Halaman

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB II PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan..... 4

1.4 Sistematika Penulisan..... 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2025 ..... 8

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah ..... 13

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis ..... 17

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

3.1. Rancangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 ..... 20

3.2. Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 ..... 23

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

Dipindai dengan CamScanner

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 disusun sebagai tindak lanjut dari perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2025. Dokumen ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendapatan daerah, dengan mempertimbangkan dinamika kondisi pembangunan, perubahan kebijakan, serta perkembangan realisasi pelaksanaan program pada tahun berjalan.

Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025 dilatarbelakangi oleh adanya penyesuaian terhadap kebijakan daerah dan kebutuhan untuk mengakomodasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja sebelumnya. Selain itu, perubahan ini juga dimaksudkan untuk menyesuaikan target kinerja dan alokasi anggaran terhadap kondisi aktual, termasuk dampak dari perubahan regulasi perpajakan daerah dan perkembangan potensi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Nunukan.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dalam mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi pengelolaan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah berperan strategis dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. Fokus utama dalam Renja Perubahan Tahun 2025 diarahkan pada peningkatan optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, penyempurnaan basis data pajak dan retribusi, serta penguatan sistem dan inovasi dalam pelayanan kepada wajib pajak.

Melalui Renja Perubahan ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 dapat lebih efektif, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, serta berkontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah.

Awal Renja perubahan dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026. Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

Dipindai dengan CamScanner

a. Persiapan penyusunan;
b. Penyusunan Rancangan Awal;
c. Penyusunan Rancangan;
d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
e. Perumusan Rancangan Akhir; dan
f. Penetapan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) PerubahanBadan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2025 adalah:

1. Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia No 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Dipindai dengan CamScanner

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keungunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomr 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Dipindai dengan CamScanner

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Nunukan Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan);
21. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 65 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2025.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2025 adalah memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait, dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan untuk periode 1 (satu) tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan .

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2025, yaitu:

1. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program dan kegiatan;
2. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan;

Dipindai dengan CamScanner

3. Mendapatkan penilaian kinerja yang terukur sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan ;
4. Memastikan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan konsistensi program dan kegiatan sampai dengan dokumen penyusunan dokumen anggaran;
5. Memastikan konsistensi arah kebijakan perangkat daerah dengan rumusan pelaksanaannya melalui program/kegiatan;
6. Mendukung prioritas Kepala Daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan sesuai dengan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan .

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Dasar PertimbanganPerubahan

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

2.2. Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 Sampai Dengan Triwulan II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

3.1. Rancangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

3.2. Matrik Rencana Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

## BAB II

## EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Dipindai dengan CamScanner

## 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan Sampai Dengan Triwulan II

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan triwulan II menunjukkan capaian yang cukup baik meskipun masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi ketercapaian target.

Rencana Kerja perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2025 memuat memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan . Keberhasilan perencanaan dapat dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan didalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan. Dukungan pembiayaan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan yang sesuai dengan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025.

Realisasi penyerapan anggaran pada Badan Pendapatan Daerah kabupaten Nunukan tahun 2025 triwulan ke II adalah Rp 4.270.911.710 atau 51,15% dari target Rp Rp9.717.512.987. Berdasarkan capaian kinerja keuangan pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2025 tersebut di atas, berikut sub kegiatan yang persentase penyerapan anggarannya paling rendah:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dari anggaran sebesar Rp 17.198.000 terealisasi Rp 0 atau 0.00%
   Kegiatan tersebut secara kinerja telah tercapai 50% namun anggaran yang lebih diarahkan pada makan minum dan cetak dokumen belum di spj kan
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dari anggaran sebesar 2.018.500 terealisasi Rp 0 atau 0.00% Kegiatan tersebut secara kinerja telah tercapai 50% namun anggaran yang lebih diarahkan pada makan minum dan cetak dokumen belum di spj kan.

Dipindai dengan CamScanner

3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dari anggaran sebesar Rp 99.540.000 terealisasi Rp 0 atau 0,00%
   Realisasi anggaran 0% disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran yang dilakukan pada tahun berjalan
4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dari anggaran sebesar Rp 221.184.650 terealisasi Rp 0 atau 0,00%
   Realisasi anggaran 0% disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran yang dilakukan pada tahun berjalan.
5. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dari anggaran sebesar Rp 83.380.561 terealisasi Rp 0 atau 0,00%
   Realisasi anggaran 0% disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran yang dilakukan pada tahun berjalan.
6. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah dari anggaran Rp 11.340.000 terealisasi Rp 0 atau 0,00%
   Realisasi anggaran 0% disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran yang dilakukan pada tahun berjalan.
7. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah dari anggaran Rp 19.680.000 terealisasi Rp 0 atau 0,00%
   Realisasi anggaran 0% disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran yang dilakukan pada tahun berjalan dan kegiatan ini juga dilkasanakan jika ada pengajuan keberatan oleh wajib pajak daerah.

Dipindai dengan CamScanner

TABEL 2.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025 (TRIWULAN II)

| URAIAN | | PAGU ANGGARAN (Rp) | REALISASI | | SISA ANGGARAN (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rp | (%) | |
| **BELANJA** | | **9.717.515.222** | **9.481.925.239** | **90,38** | **1.004.382.517** |
| **Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | | **7.609.781.956** | **6.986.541.804** | **91,81** | **618.070.152** |
| **I** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **18.800.000** | **0** | **0** | **18.800.000** |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 14.097.500 | 0 | 0 | 14.097.500 |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4.702.500 | 0 | 0 | 4.702.500 |
| **II** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **7.125.511.164** | **3.733.485.012** | **52,40** | **3.392.026.152** |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.125.511.164 | 3.733.485.012 | 93,45 | 3.392.026.152 |
| **III** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **687.493.522** | **612.203.714** | **99,52** | **2.937.821** |
| 1 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 464.920.110 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 121.783.469 | 8.338.000 | 6,85 | 113.445.469 |
| 3 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 213.990.650 | 0 | 0 | 213.990.650 |
| 4 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 129.146.000 | 57.904.296 | 44,84 | 71.241.704 |
| **IV** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | 390.193.816 | 135.798.460 | 34,80 | 254.395.356 |
| 1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 73.992.600 | 18.180.000 | 24,57 | 55.812.600 |



Dipindai dengan CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 316.201.216 | 117.618.460 | 37,20 | 198.582.756 |
| **V** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **60.842.503** | **7.478.300** | **12,29** | **53.364.203** |
| 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 44.340.003 | 7.478.300 | 16,87 | 36.861.703 |
| 2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 16.502.500 | 0 | 0,00 | 16.502.500 |
| **Program Pengelolaan keuangan Daerah** | | **77.764.000** | **9.994.540** | **100** | **1.414.726** |
| **V** | **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | **77.764.000** | **9.994.540** | **100** | **1.414.726** |
| 1 | Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya | 77.764.000 | 9.994.540 | 100 | 1.414.726 |
| **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah** | | **1.097.802.110** | **298.280.102** | **27,17** | **799.522.008** |
| **V** | **Pengelolaan Pendapatan Daerah** | **1.097.802.110** | **298.280.102** | **27,17** | **799.522.008** |
| 1 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | 71.815.000 | 30.811.980 | 42,90 | 41.003.020 |
| 2 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | 64.909.000 | 11.760.000 | 18,12 | 53.149.000 |
| 3 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 176.136.500 | 26.840.000 | 15,24 | 149.296.500 |
| 4 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | 191.460.000 | 0 | 0,00 | 191.460.000 |



Dipindai dengan CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | 80.434.000 | 44.258.472 | 55,02 | 36.175.528 |
| 6 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | 45.372.000 | 11.970.000 | 26,38 | 33.402.000 |
| 7 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 92.709.500 | 11.932.220 | 12,87 | 80.777.280 |
| 8 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 48.035.000 | 10.074.318 | 20,97 | 37.960.682 |
| 9 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | 107.737.000 | 64.645.000 | 60,00 | 43.092.000 |
| 10 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 | Penagihan Pajak Daerah | 60.805.750 | 29.090.000 | 47,84 | 31.715.750 |
| 13 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | 8.180.000 | 0 | 0,00 | 8.180.000 |
| 14 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | 92.036.680 | 28.777.812 | 31,27 | 63.258.868 |
| 15 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 58.171.680 | 28.120.300 | 48,34 | 30.051.380 |

Penerapan efisiensi anggaran pada Badan Pendapatan Daerah menimbulkan tantangan berupa terbatasnya dukungan terhadap kegiatan sosialisasi dan pengawasan, sehingga diperlukan strategi agar kualitas pelayanan publik tetap terjaga. Hingga triwulan ke II secara keseluruhan penggunaan anggaran telah mencapai 51,15%.



Dipindai dengan CamScanner

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Pada Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II Realisasi Kinerja tujuan persentase PAD terhadap pendapatan mencapai 8,33% dengan indikator sasaran persentase pertumbuhan PAD sebesar 3,06%. Berikut disjikan tabel evaluasi Renja triwulan II:



Dipindai dengan CamScanner

## EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
## TAHUN ANGGARAN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Nama OPD : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan Dalam Renstra OPD Tahun 2025 (Tahun Akhir Periode Renstra) | | Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan Dalam Renja OPD Tahun 2025 | | Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025 (kumulatif Triwulan I dan Triwulan II) | | Persentase Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025 | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | (10)= 8/6 *100 | (11)= 9/7*100 | 12 |
| | Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang | | | | | | | | | | |
| | Bidang Urusan Perencanaan | | | | | | | | | | |
| | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran** | **100%** | **6.410.745.756** | **100%** | **7.220.009.887** | 38,04% | 3.943.004.068 | 38,04 | 54,61 | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 dokumen | 15.000.000 | 2 | 17.198.000 | 1 | 0 | 50 | 0 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD danlaporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 laporan | 10.000.000 | 3 | 2.018.500 | 2 | 0 | 67 | 0 | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 155 orang/bulan | 16.473.072.480 | 31 | 6.004.784.716 | 31 | 3.733.485.012 | 100 | 62,18 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 50 paket | 522.935.000 | 10 | 99.540.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket logistik yang disediakan | 215 paket | 370.711.250 | 43 | 153.174.644 | 20 | 8.338.000 | 46,51 | 5,44 | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | 130 paket | 1.136.965.000 | 26 | 221.184.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | |



Dipindai dengan CamScanner

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 25 laporam | 549.456.000 | 5 | 313.093.000 | 3 | 57.904.296 | 22,80 | 18,49 | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 60 laporan | 383.713.000 | 12 | 73.992.600 | 6 | 18.180.000 | 50 | 24,57 | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | 60 laporan | 10.832.313.550 | 12 | 251.643.216 | 6 | 117.618.460 | 50 | 46,74 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 105 unit | 328.187.500 | 21 | 59.830.561 | 7 | 7.476.300 | 33,33 | 12,50 | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | 35 unit | 225.000.000 | 7 | 23.550.000 | 7 | 0 | 100 | 0 | |
| | **Program pengelolaan keuangan** | Persentase penerimaan dana transfer ke daerah | | | | | | | | | |
| | koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya | Jumlah dokumen hasil Koordinasi, fasilitasi, asistensi, singkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya | 5 dokumen | 1.190.396.000 | 1 | 328.216.000 | 1 | 9.994.540 | 100 | 3,05 | |
| | **Program pengelolaan pendapatan** | Persentase Pertumbuhan pajak daerah | | | | | | | | | |
| | Perencanaan pengelolaan pajak daerah | jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah | 10 dokumen | 250.000.000 | 2 | 86.271.000 | 1 | 30.811.980 | 50 | 35,72 | |
| | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi | 9 laporan | 1.000.000.000 | 2 | 55.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah | 10 unit | 500.000.000 | 2 | 130.642.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah | 60 laporan | 750.000.000 | 12 | 238.448.000 | 3 | 26.840.000 | 25 | 11,26 | |
| | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. | jumlah dokumen hasil analis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah | 17 dokumen | 230.136.000 | 4 | 55.073.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |



Dipindai dengan CamScanner

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah, subyek pajak dan wajib pajak daerah | 25 laporan | 500.000.000 | 5 | 201.714.000 | 2 | 11.970.000 | 40 | 5,93 | |
| | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah | 120 layanan | 50.000.000 | 120 | 11.340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | jumlah laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 326170 laporan | 250.000.000 | 69011 | 203.022.000 | 69011 | 23.620.000 | 100 | 5,88 | |
| | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Jumlah obyek pajak yang disesuaikan NJOP nya | 25 objek pajak | 1.001.307.400 | 5 | 249.339.500 | 1 | 10.074.318 | 20 | 4,04 | |
| | Penetapan Wajib Pajak Daerah | jumlah dokumen ketetapan pajak daerah | 326770 dokumen | 1.326.123.000 | 69131 | 115.360.000 | 69131 | 64.645.000 | 100 | 56,04 | |
| | Penagihan Pajak Daerah | jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah | 26 dokumen | 1.001.307.400 | 5 | 207.120.000 | 3 | 29.090.000 | 60 | 14,04 | |
| | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah | 25 dokumen | 100.000.000 | 5 | 19.680.000, | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | jumlah dokumen hasil pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah | 110 dokumen | 588.914.000 | 22 | 251.422.300 | 5 | 28.777.812 | 23 | 11,45 | |
| | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pajak daerah | 35 laporan | 100.000.000 | 7 | 147.832.300 | 2 | 26.110.000 | 28,57 | 18,41 | |
| | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | 0 laporan | 0 | 2 | 98.724.000 | 2 | 44.258.472 | 100 | 44,83 | |

Nunukan, 12/7/2025

Kepala

(Fitraeni, Sos)
NIP.19731130200122002



Dipindai dengan CamScanner

## 2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pengelolaan pendapatan daerah, masih terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian.

1. Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Penerapan Tarif Pajak

   Sebagian besar pelaku usaha belum menerapkan pengenaan tarif pajak 10%, sehingga potensi penerimaan daerah belum optimal. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi, pengawasan, serta penegakan regulasi.

2. Belum Tersedianya Alat Ukur atas Objek Pajak Tertentu

   Belum adanya alat ukur pemakaian air tanah dan mekanisme pencatatan yang valid untuk penjualan sarang burung walet menyebabkan potensi pendapatan tidak terukur secara akurat.

3. Keterlambatan Pelaporan dan Pembayaran Pajak oleh Wajib Pajak (WP)

   Masih terdapat sejumlah wajib pajak yang terlambat melaksanakan pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga mengganggu target realisasi penerimaan daerah.

4. Ketidaksesuaian Laporan Pajak dengan Omzet Usaha

   Sebagian besar wajib pajak tidak melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan omzet usaha sebenarnya, yang berpotensi menimbulkan kebocoran penerimaan daerah.

5. Keterbatasan SDM Fungsional Pemeriksa Pajak

   Belum adanya personel atau staf fungsional pemeriksa pajak (juru sita) menyebabkan pelaksanaan penegakan hukum pajak daerah tidak berjalan optimal.

6. Tingkat Kepatuhan yang Rendah Meski Telah Dilakukan Pembinaan

   Masih terdapat wajib pajak yang sudah diberikan pembinaan namun tetap tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagaimana mestinya. Hal ini menuntut strategi penegakan hukum yang lebih tegas dan terukur.



Dipindai dengan CamScanner

Oleh sebab tersebut di atas,maka diperlukan upaya atau strategi yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, yaitu

1. Melakukan uji potensi dan pengawasan bersama serta pemeriksaan sederhana
2. Mengarahkan agar pelaku usaha air tanah menggunakan alat ukur (water meter) serta melakukan pengawasan dengan melibatkan satpol pp dan instansi terkait
3. Menerapkan pengenaan denda terhadap wp yang telat lapor dan telat bayar
4. Melakukan uji potensi dan pengawasan bersama serta pemeriksaan sederhana
5. Mengusulkan kepada bkpsdm agar membuka formasi cpns khusus untuk pemeriksa pajak atau menempatkan pns yang bersedia mengikuti diklat juru sita
6. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan rutin bekerjasama dengan satpol pp



Dipindai dengan CamScanner

# BAB III

# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

## 3.1. Rancangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2025

Berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditentukan dalam rancangan RKPD perubahan kabupaten Nunukan tahun 2025 maka Badan Pendapatan Daerah merumuskan program,kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2025 triwulan IV:



Dipindai dengan CamScanner

TABEL T-C. 33

RUMUSAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

KABUPATEN NUNUKAN

Nama OPD : Badan Pendapatan Daerah Kab. Nunukan

| NO | URUSAN BIDANG | PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | | INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT) | | TARGET KINERJA | | | PAGU | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SEMULA | MENJADI | SEMULA | MENJADI | RKPD 2025 | DPA (APBD 2025) | PERUBAHAN RKPD 2025 | RKPD 2025 | DPA (APBD 2025) | PERUBAHAN RKPD 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | |
| A | **KEUANGAN** | | | | | | | | **7.568.191.856** | **7.716.462.537** | **8.931.770.887** |
| | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran** | **Persentase penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran** | **100%** | **100%** | **100%** | **5.410.828.765** | **5.794.520.637** | **6.140.409.487** |
| | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | 5 dokumen | 5 dokumen | 5 dokumen | **5.000.000** | **4.917.000** | **4.917.000** |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun | jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 3.000.000 | 2.981.000 | 2.981.000 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD danlaporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD danlaporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 laporan | 3 laporan | 3 laporan | 2.000.000 | 1.936.000 | 1.936.000 |
| | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Jumlah dokumen pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah** | **Jumlah dokumen pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah** | 24 Dokumen | 24 Dokumen | 24 dokumen | **3.812.435.215** | **4.686.528.827** | **4.686.528.827** |



Dipindai dengan CamScanner

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 12 bulan | 12 bulan | 31 orang | 3.812.435.215 | 4.686.528.827 | 4.686.528.827 |
| | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi umum perangkat daerah** | **Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi umum perangkat daerah** | 4 laporan | 4 laporan | 4 laporan | **651.013.450** | **637.777.590** | **983.668.440** |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 4 paket | 4 paket | 4 paket | 200.000.000 | 195.755.890 | 309.992.740 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket logistik yang disediakan | Jumlah paket logistik yang disediakan | 10 paket | 10 paket | 10 paket | 183.587.000 | 183.587.000 | 183.587.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | 25 paket | 25 paket | 25 paket | 117.426.450 | 133.171.500 | 212.871.500 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 5 laporan | 5 laporan | 5 laporan | 150.000.000 | 125.263.200 | 277.215.200 |
| | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** | **Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** | 100% | 100% | 2 laporan | **876.742.600** | **374.500.920** | **374.500.920** |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 76.742.600 | 76.392.600 | 76.392.600 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 800.000.000 | 298.108.320 | 298.108.320 |
| | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase terpelihanya barang milik daerah di bapenda** | **Jumlah Barang milik Daerah yang dipelihara** | 100% | 28 Unit | 28 Unit | **65.637.500** | **90.796.300** | **90.796.300** |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 21 Unit | 21 Unit | 21 Unit | 65.637.500 | 90.796.300 | 90.796.300 |
| | | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | **Persentase penerimaan dana transfer ke daerah** | **Persentase penerimaan dana transfer ke daerah** | 100% | 100% | 100% | **250.130.000** | **265.281.200** | **315.281.200** |



Dipindai dengan CamScanner

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | **Persentase pelaksanaan koordinasi pengelolaan dana transfer ke daerah** | **Jumlah koordinasi pengelolaan dana transfer ke daerah** | 100% | 6 kali | 6 kali | **250.130.000** | **265.281.200** | **315.281.200** |
| | | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Jumlah dokumen hasil Koordinasi, fasilitasi, asistensi, singkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya | Jumlah dokumen hasil Koordinasi, fasilitasi, asistensi, singkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Dokumen | 250.130.000 | 265.281.200 | 315.281.200 |
| | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | **Persentase Pertumbuhan pajak daerah** | **Persentase Pertumbuhan pajak daerah** | 11,73% | 75,71% | 0,59% | **1.935.224.600** | **1.656.660.700** | **2.476.080.200** |
| | | **Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah** | **Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah** | **Persentase penerimaan pajak daerah** | **Jumlah pajak daerah** | 100% | Rp30.519.113.000 | Rp30.519.113.000 | **1.935.224.600** | **1.656.660.700** | **2.476.080.200** |
| | | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. | jumlah dokumen hasil analis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah | jumlah dokumen hasil analis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah | 5 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100.000.000 | 55.073.800 | 113.858.800 |
| | | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | jumlah sosialisasi Pajak daerah dan Retribusi daerah | jumlah sosialisasi Pajak daerah dan Retribusi daerah | 12 Kali | 12 Kali | 12 Kali | 150.000.000 | 182.557.400 | 202.707.400 |
| | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | jumlah ketersediaan sarana dan prasarana | jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah | 2 Unit | 2 Unit | 2 Unit | 150.000.000 | 149.792.600 | 131.815.000 |
| | | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | jumlah wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang terdaftar | jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah, subyek pajak dan wajib pajak daerah | 5 Laporan | 5 Laporan | 5 laporan | 250.000.000 | 267.690.000 | 267.690.000 |
| | | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | jumlah data wajib pajak daerah | jumlah laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 60329 Laporan | 60329 Laporan | 60329 Laporan | 70.000.000 | 69.770.000 | 159.831.600 |
| | | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan | Jumlah obyek pajak yang disesuaikan NJOP nya | Jumlah obyek pajak yang disesuaikan NJOP nya | 5 obyek pajak | 5 obyek pajak | 5 obyek pajak | 250.000.000 | 243.231.200 | 402.620.000 |



Dipindai dengan CamScanner

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | | | | | | | | |
| | | Penetapan Wajib Pajak Daerah | Penetapan Wajib Pajak Daerah | jumlah wajib pajak daerah yang ditetapkan | jumlah dokumen ketetapan pajak daerah | 56162 wp | 40000 wp | 56162 wp | 265.224.600 | 258.170.000 | 258.170.000 |
| | | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi | jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 10.000.000 | 10.272.100 | 11.510.000 |
| | | Penagihan Pajak Daerah | Penagihan Pajak Daerah | jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah | jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 20.000.000 | 180.884.000 | 203.625.600 |
| | | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah | jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 20.000.000 | 18.700.000 | 18.700.000 |
| | | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | jumlah dokumen hasil pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah | jumlah dokumen hasil pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah | 22 Dokumen | 22 Dokumen | 22 Dokumen | 200.000.000 | 220.519.600 | 287.137.400 |
| | | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pajak daerah | jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pajak daerah | 7 Laporan | 7 Laporan | 7 Laporan | 150.000.000 | 149.703.000 | 228.653.000 |
| | | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | 2 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan | 300.000.000 | 201.281.400 | 189.761.400 |
| **TOTAL** | | | | | | | | | **7.596.183.365** | **7.716.462.537** | **8.931.770.887** |

Kepala Badan

Fitraeni, S.Sos

Nip 197311302001122002



Dipindai dengan CamScanner

3.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah kabupaten Nunukan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah kabupaten Nunukan tahun 2021-2026. Perumusan tujuan dan sasaran Renja tahun 2025 juga berdasarkan pada analisis terhadap isu-isu strategis dan aktual yang tengah berlangsung dan diselaraskan dengan misi IV Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan agenda reformasi birokrasi. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama keberhasilan pencapaian pembangunan daerah dimana kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pelaksanaan agenda reformasi birokrasi guna menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan birokrasi dengan pelayanan publik yang responsif, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya menjadi kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Peningkatan kualitas dan kapasitas ASN menjadi upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini didukung oleh perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas.

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang diharapkan mampu mendukung peneyelenggaraan keuangan daerah yang berkualitas adalah Optimalisasi kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dengan sasaran pada Meningkatnya Penerimaan PAD.



Dipindai dengan CamScanner

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|---|
| | Optimalisasi kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah | Meningkatnya Penerimaan PAD | Persentase Pertumbuhan PAD | 2,86% |



Dipindai dengan CamScanner

## BAB IV
## PENUTUP

Renja Badan Pendapatan Daerah perubahan tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 di lingkup Badan Pendapatan Daerah guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2025 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, isi dokumen Renja ini diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Badan Pendapatan Daerah, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan tahun 2025 sesuai dengan yang dicita-citakan. Hingga triwulan kedua pelaksanaaan renja tahun 2018 tidak terdapat kendala teknis yang bisa menghambat pencapaian indikator kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan, kendala terbatas pada ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bapenda.

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada pengembangan pelayanan.

Nunukan, Juli 2025

Kepala Badan

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Fitraeni, S.Sos

NIP. 19731130 2001122002



Dipindai dengan CamScanner